

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN URUSAN
LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL TEMBILAHAN DI KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Retgi Hastriana
NPM : 157110622**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2019**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan
Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras
Sejahtera)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Nurmasari, S.Sos., M.Si.


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Ketua,

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Sekretaris,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

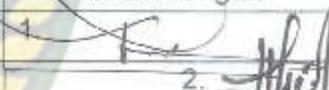
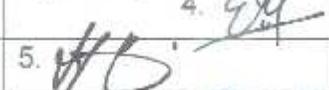
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 616 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 Juli 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 Juli 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).

Nilai Ujian : Angka : " 81,4 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian Tim Penguji : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.	Ketua	1. 
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.SP.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 10 Juli 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 610/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Retgi Hastriana
N P M	: 157110622
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera.).

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa., MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Hendry Andry., S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nurmasari., S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Emma Fitri Lubis., S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Lilis Suryani., S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Made Devi Wedayanti., S.AP., M.AP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juli 2019
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin., S.Ip., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan
Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras
Sejahtera).

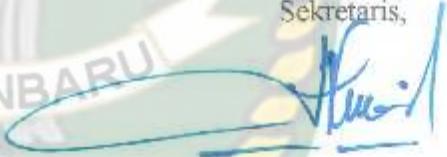
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

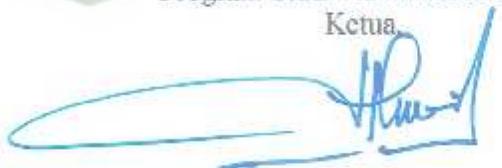

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

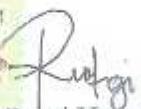
1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah);
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Pelaku Pernyataan,




Retgi Hastriana

**ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN URUSAN
LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL TEMBILAHAN DI KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA)**

ABSTRAK

Retgi Hastriana

**Kata Kunci : Efektifitas, Tugas Bulog Sub Divisi Regional Tembilahan,
Pendistribusian Bansos Rastra**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan pelaksanaan tugas Bulog dalam pendistribusian Bansos Rastra untuk masyarakat yang kurang mampu (KPM/Keluarga Penerima Manfaat) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetahui respon keluarga penerima manfaat terhadap program Bansos Rastra. Indikator penilaian efektifitas yang digunakan meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Tipe penelitian ini berlokasi di Kecamatan Keritang ini menggunakan metode survey deskriptif kuantitatif. Terdapat lima kelompok populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu wawancara 2 orang (Pimpinan Bulog dan Pak Camat), pegawai Bulog berjumlah 6 orang, Kepala Desa berjumlah 6 orang, Pak RT berjumlah 6 orang dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berjumlah 30 orang. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian terhadap Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) masuk dalam katagori Kurang Efektif. Adapun kendala yang di hadapi dalam pendistribusian Bansos Rastra yaitu data yang digunakan masih data lama dan kurang sosialisasi yang diberikan.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTY OF THE LOGISTIC BOARD OF REGIONAL SUB DIVISION TEMBILAHAN IN KERITANG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR DISTRICT (DISTRIBUTION STUDY OF PROSPEROUS RICE SOCIAL ASSISTANCE)

ABSTRACT

Retgi Hastriana

Keywords : Effectiveness, Tasks of Regional Sub Division Tembilahan Bulog, Distribution of Rastra Bansos

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Bulog assignments in the distribution of Literature Bansos for disadvantaged communities (KPM / Beneficiary Families) in Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency and to find out the response of families of beneficiaries to the Rastra Bansos program. Indicators for assessing effectiveness used include achievement of goals, integration and adaptation. This type of research is located in Keritang District using quantitative descriptive survey method. There are five population groups and the sample in this study is interviewing 2 people (Bulog Leader and Head of Sub-District), Bulog employees are 6 people, the Village Head is 6 people, the RT is 6 people and the KPM (Family Beneficiary) is 30 people. In this study researchers collected data through questionnaires, interviews, observation, and documentation. The results of the research on the Analysis of the Effectiveness of the Tasks of the Regional Sub Division Tembilahan. Logistic Affairs in Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency (Prosperous Rice Social Assistance Distribution Study) were included in the category of Less Effective. The constraints faced in the distribution of the Rastra Bansos are the data used are still old data and lack of socialization provided.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan
Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras
Sejahtera)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif Skripsi ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Pelaku Pernyataan,

Retgi Hastriana

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan
Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras
Sejahtera).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Retgi Hastriana
NPM : 157110622
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan
Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras
Sejahtera)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Ketua,

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Sekretaris,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya yang diberikan oleh ALLAH SWT, sehingga dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan judul **“Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)”**.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam rangka meraih gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Islam Riau. Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan kesediaan untuk meluangkan waktu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kesediaan untuk meluangkan waktu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang. Dan seluruh Staff, Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau.

8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih kepada Ayahanda Asmar dan Ibunda Andi Hasmawati yang sangat ananda cintai yang telah memberikan semangat, membimbing, menasehati serta senantiasa mendo'akan ananda untuk selalu sukses dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama terimakasih buat sepupu aku yang menemanin saat penelitian A. Indah Sofia dan Mahdalena. Dan terimakasih buat kamu TSA yang sabar nemanin ngerjain skripsi dan selalu semangat in aku.
9. Kepada sahabat-sahabat khususnya Mustika, Amel, Dita, Marsha Novita, Juwita, Dewi yang memberikan dukungan dan do'a. Dan buat seluruh anak-anak Organisasi Himia Publik, dan juga seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 khususnya kelas AP. C, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan. Terimakasih juga buat anak-anak Hago yang memberikan dukungan dan do'anya dalam kelancaran skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 31 Juli 2019

Penulis,

Retgi Hastriana

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
BAB II STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR	25
A. Studi Kepustakaan	25
1. Konsep Administrasi	25
2. Konsep Organisasi	26
3. Konsep Manajemen	27
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	28
5. Konsep Manajemen Logistik	30
6. Konsep Efektifitas	31
7. Konsep Koordinasi	33
8. BULOG (Badan Urusan Logistik)	35
B. Kerangka Pikir	36
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel	38
E. Teknik Pengukuran	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	50
1. Visi dan Misi Bulog	50
2. Tata Nilai Perum Bulog	51
3. Tugas Pokok Bulog	52
B. Gambaran Umum Kecamatan Keritang	53
1. Sejarah Kecamatan Keritang.....	53
2. Keadaan Geografis Kecamatan Keritang	54
3. Penduduk	56
4. Agama	57
C. Badan Struktural Perum BULOG Subdivre Tembilahana	59
D. Badan Organisasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
BAB V DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Identitas Responden	61
1. Jenis Kelamin	61
2. Umur Responden.....	62
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	62
B. Hasil Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	63
1. Pencapaian Tujuan	64
2. Integrasi	68
3. Adaptasi	71
C. Faktor-faktor Penghambat Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	77
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1 :	Nama-nama Program Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divisi Regional Tembilahan	7
I.2 :	Nama-nama desa di Kecamatan Keritang yang mendapatkan Beras Bersubsidi (Bansos Rastra)	12
I.3 :	Nama-nama desa di Kecamatan Masalah dalam penyaluran Beras bersubsidi (Bansos Rastra)	13
II.1 :	Operasional Variabel Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	39
III.1 :	Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	45
III.2 :	Jadwal kegiatan peneliti mengenai Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	49
IV.1 :	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Keritang tahun 2017....	55
IV.2 :	Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Keritang tahun 2017	56
IV.3 :	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Keritang tahun 2017	58
V.1 :	Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	61
V.2 :	Identitas Responden berdasarkan Umur Responden.....	62
V.3 :	Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden...	62
V.4 :	Tanggapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Indikator Pencapaian Tujuan.....	64
V.5 :	Tanggapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap Indikator Pencapaian Tujuan.....	65

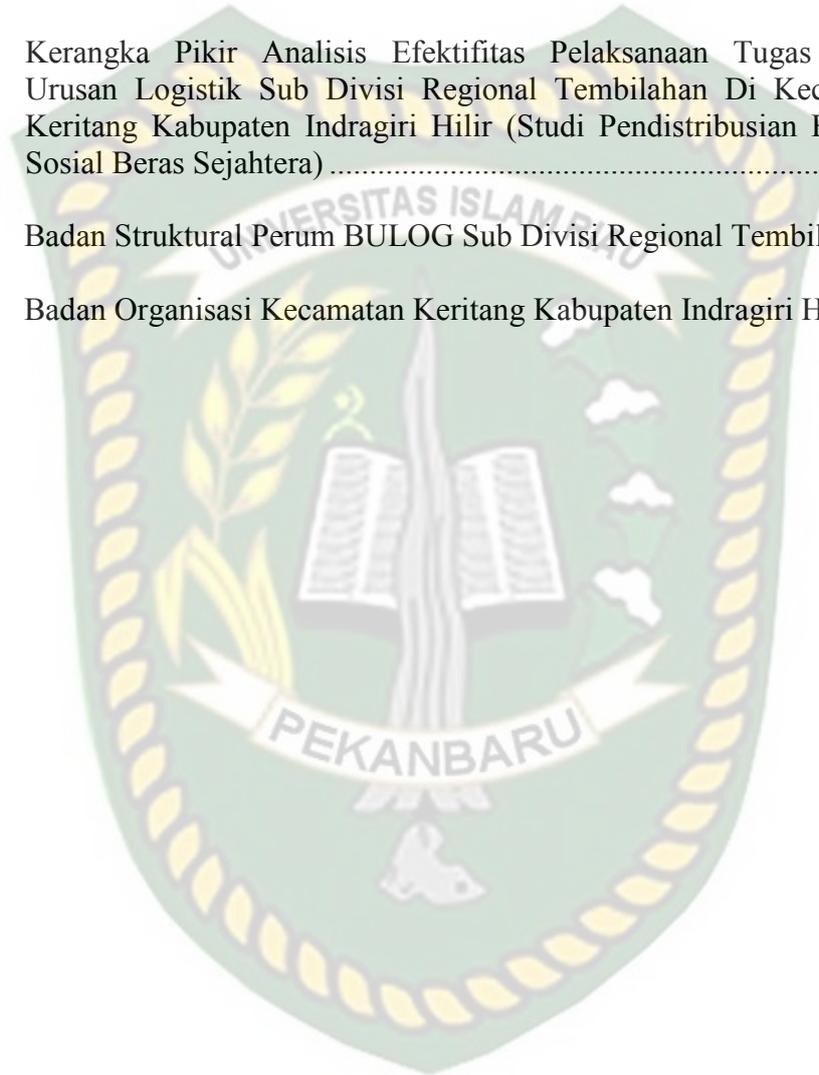
V.6	: Tangapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Indikator Integritas	68
V.7	: Tangapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap Indikator Integritas	69
V.8	: Tangapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Indikator Adaptasi	72
V.9	: Tangapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap Indikator Adaptasi	72
V.10	: Rekapitulasi Tangapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	75
V.11	: Rekapitulasi Tangapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Gambar Mekanisme dalam Pendistribusian Bansos Rastra	16
II.1 : Kerangka Pikir Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	36
IV.1 : Badan Struktural Perum BULOG Sub Divisi Regional Tembilahan....	59
IV.2 : Badan Organisasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	60

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner Penelitian untuk Responden Pegawai Bulog tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) ...	84
2. Daftar Kuisioner Penelitian untuk Responden Kepala Desa tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	91
3. Daftar Kuisioner Penelitian untuk Responden Pak RT tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	98
4. Daftar Kuisioner Penelitian untuk Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	105
5. Daftar Wawancara Penelitian untuk Pimpinan Bulog tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).....	112
6. Daftar Wawancara Penelitian untuk Pak Camat Keritang tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	116
7. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden dari Pegawai Bulog, Kades, Pak RT tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	120

8. Hasil Rekapitulasi Data Telly Jawaban Responden dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Rgional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) 122
9. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) 124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia ini tentulah melaksanakan pembangunan untuk negaranya. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya seringkali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam pembangunan ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari administrasi yang baik juga, oleh karena itu secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan.

Menurut Leonard D. White mendefinisikan administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai yang dikehendakinya (dalam Zulkifli dan Moris 2014;11). Oleh karena itu administrasi juga berperan penting dalam pembangunan.

Administrasi dan organisasi saling berhubungan satu sama lain, karena agar dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Menurut Zulkifli dan Moris (2014;38),mendefiniskan organisasi merupakan sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil,dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Upaya pencapaian tujuan organisasi tidak terpisahkan dari fungsi manajemen, karena manajemen memiliki peran yang penting dalam organisasi. Menurut George R.Terry mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *perencanaan, organisasi, pergerakan,* dan *pegawasan* dimana pada masing-masing bidang di gunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris 2014;18). Dari penjelasan diatas, manajemen yang mengatur atau mengarahkan organisasi, dan hal tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia yang memadai atau yang ada di dalam organisasi.

Menurut Hasibuan (2006;10),Manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,karyawan,dan masyarakat. Dengan demikian sangat perlu adanya manajemen sumber daya manusia, karena dengan memanfaatkan fungsi manajemen sumber daya manusia dapat memberikan dukungan kepada semua personil dalam organisasi guna untuk mencapai tujuan bersama.

Indonesia salah satu negara dunia ketiga yang tengah berusaha melakukan pemajuan dan pengembangan bagi negaranya, Indonesia juga harus menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Oleh karena itu tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi sangat mempengaruhi proses pembangunan, atau dengan kata lain kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun, yang mana upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan berupa bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga dan masih banyak lagi. Salah satunya dalam program bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga, seperti Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea), dalam hal ini program tersebut merupakan salah satu program yang membantu masyarakat yang kurang mampu baik dalam kebutuhan pokok (pangan) maupun perekonomian.

Dalam bidang perekonomian, kegiatan perindustrian memiliki peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya kegiatan tersebut sebagian besar kebutuhan manusia akan terpenuhi. Suatu produk akan bisa sampai kepada masyarakat melalui saluran distribusi. Saluran distribusi adalah bagaimana agar setiap produk yang diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan dapat memperolehnya dengan mudah. Sebab bagaimanapun sempurnanya suatu produk atau jasa tidak akan berarti apa-apa bila berada jauh dari jangkauan masyarakat

dan tidak bisa dinikmati masyarakat pada saat mereka membutuhkan produksi tersebut.

Dalam arti kata, produk akan dapat dimanfaatkan apabila penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif dalam pengiriman. Sistem distribusi sangat berperan penting bagi organisasi karena Pemilihan dan penentuan saluran distribusi bukan suatu hal yang mudah karena kesalahan dalam memilih saluran distribusi akan dapat menggagalkan tujuan organisasi yang telah di tentukan.

Pemilihan saluran distribusi yang salah dapat menimbulkan penghamburan biaya atau pemborosan. Oleh sebab itu masalah pemilihan saluran distribusi akan sangat penting artinya bagi organisasi yang menginginkan perkembangan kegiatannya. Untuk menempatkan barang dan jasa pada tempat yang tepat, kualitas yang tepat dibutuhkan saluran distribusi yang tepat pula. Bila organisasi salah dalam memilih saluran distribusi maka akan dapat mengganggu kelancaran arus barang atau jasa dari organisasi ke tangan masyarakat. Untuk itu organisasi selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, dan setiap organisasi ingin mendapatkan hasil yang efektif, karena menurut Soedjadi mengatakan Efektifitas adalah kegiatan yang telah di laksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan (dalam Nawawi, 2003;40). Oleh karena itu efektifitas merupakan hasil pencapaian dalam suatu organisasi.

Menurut Wanggai (2012:21) menuliskan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, di kelola ke dalam tiga kluster besar:

1. Kluster I, yaitu bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini ada bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan (PKH), Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) serta langkah-langkah subsidi dan

bantuan sosial lainnya yang langsung menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung.

2. Kluster II, yang memuat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Kluster III, yaitu program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan komponen program lainnya.

Sebagai realisasi pengurangan kemiskinan, program-program di atas telah dilakukan oleh pemerintah, meski demikian kemiskinan masih tetap menjadi penghambat dalam pembangunan.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG atau Badan Urusan Logistik adalah Badan Usaha Milik Negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras). Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi Bulog :

Tugas Bulog

Tugas dari Badan urusan logistik adalah melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan dan mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bulog

Berikut beberapa fungsi Bulog:

1. Menetapkan kebijakan pada bidang manajemen logistik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan umum pemerintah
2. Sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang usaha jasa logistik
3. Sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang operasi
4. Melakukan perencanaan pada bidang-bidang berikut, antara lain keuangan, Sumber Daya Manusia, dan jasa logistik
5. Mengelola sumberdaya yang akan melaksanakan tugas Bulog supaya berhasil serta mempunyai daya guna
6. Melakukan pengawasan terhadap segala macam tugas yang dilakukan dilingkungan Bulog
7. Mengelola Sumber daya manusia dan keuangan.

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 pasal 2 di katakana “BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Di kuatkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 pasal 3 menyatakan “dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pembinaan dibidang manajemen logistik sesuai kebijakan umum,pemerintah,dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Perencanaan dibidang operasi,usaha jasa logistik,keuangan, dan sumberdaya manusia
- c. Penyelenggaraan kegiatan dibidang operasi
- d. Penyelenggaraan kegiatan dibidang usaha jasa logistik
- e. Pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia
- f. Pengawasan terhadap plaksanaan tugas smua unsur dilingkungan BULOG
- g. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas BULOG secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada PERUM (Perusahaan Umum) BULOG (Badan Urusan Logistik) dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional terdapat dalam pasal 9,yaitu:

1. Perum BULOG dapat melakukan penyaluran pangan yang di kelolanya untuk kebutuhan:
 - a. Masyarakat berpendapat rendah untuk beras
 - b. industri pakan ternak untuk jagung
 - c. pengrajin tahu dan tempe untuk kedelai dan
 - d. kebutuhan lainnya.
2. Penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. Penyaluran jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
4. Jenis kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan penyalurannya ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan BULOG (Badan Urusan Logistik) merupakan Organisasi yang sangat berperan penting dalam pendistribusian, salah satunya dalam pendistribusian pangan (beras). Dimana BULOG (Badan Logistik) yang menetapkan, mengatur, menyelenggarakan, mengelola dan sebagainya dalam kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program-program PERUM (Perusahaan Umum) BULOG Subdivre Tembilahan, yang mana terdiri dari dua bagian, agar lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel I.1 : Nama-nama Program Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divisi Regional Tembilahan

No.	Nama Program	Bagian Program	Manfaat
1.	PSO (Public Service Obligation) atau Kewajiban Pelayanan publik	a. Bansos Rastra	1. Membantu masyarakat dalam kebutuhan pangan (Beras) 2. Mempermudah pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan 3. Membantu perekonomian masyarakat yang berpendapat rendah

		b.CBP (Cadangan Beras Pemerintah), antara lain : a) OP (Operasi Pasar) b) Bencana Alam c) TNI/POLRI Dan Lain-lain (penugasan Pemerintah)	1. Mempermudah masyarakat agar tetap memenuhi kebutuhan pangan 2. Untuk ketahanan pangan 3. Stabilitas harga pangan
2.	Komersial (kedua belah pihak kerjasama agar mendapatkan keuntungan)	a. Penjualan, antara lain: a) Beras b) Gula c) Minyak goreng d) Daging e) Tepung f) Jagung g) Dan lain-lain.	1. Bersaing dengan swasta tetapi harganya lebih murah dari swasta 2. Untuk stabilitas harga pangan 3. Keuntungan perusahaan Badan Urusan Logistik
3.	On-Farm (Kegiatan petani hulu)	Kesejahteraan petani	1. Memberikan modal untuk petani agar mempermudah petani dalam mengelola padi dan menghasilkan kualitas yang baik. 2. Untuk penguatan stok pangan Nasional 3. Menjaga stok pada jumlah tertentu saat dilakukan intervensi pasar saat dibutuhkan 4. Agar tetap adanya ketersediaan kebutuhan pokok pangan (Beras)

Sumber : Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan, 2018

Dari program-program Perum BULOG di atas, peneliti lebih mengarah ke salah satu program BULOG, yaitu program Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera). Dimana waktu itu nama beras bersubsidi yang di berikan pemerintah yaitu beras miskin (Raskin). Tanggal 28 Agustus 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengubah nama Raskin (Beras Miskin) menjadi Rastra (Beras Sejahtera) karena penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang

sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat yang miskin, agar kini beras bersubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat yang kurang mampu. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Rastra (Beras Sejahtera) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar Rp1.600,-/kg.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat berubah dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Pada tanggal 21 November 2017, hal ini juga di sampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawans akan Konversi Subsidi Beras Sejahtera ke Bansos. Menteri Khofifah juga mengatakan, di Tahun 2018 nantinya subsidi yang tadinya dikenakan uang tebusan sebesar 1.600 perkilo akan dihapus, dengan ini masyarakat bisa menerima tanpa membayar tebusan apapun. Sementara itu, Menteri Khofifah meminta agar Pemerintah Daerah dapat berkomunikasi dengan Kepala Desa sehingga masyarakat bisa menerima bansos rastra utuh tanpa harus membayar apapun.

Dari sisi penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial non tunai akan mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan mewujudkan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung. Sementara itu dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan pangan. Hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi saat ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di simpulkan bahwa Program Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) ini di buat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam kebutuhan pangan (beras) dan terutama dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang kurang mampu karena tidak adanya biaya tebus dalam pengambilan pangan (beras).

Akan tetapi program Bansos Rastra pada masyarakat memiliki banyak masalah dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada dan tidak terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya terhambatnya waktu penyaluran, jumlah beras yang tidak sesuai aturan, dan berbagai persoalan lainnya.

Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, pemberian Bansos Rastra kepada masyarakat yang kurang mampu juga dilaksanakan di setiap kabupaten salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri

Hilir juga termasuk kabupaten yang berkembang, akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang mampu. Namun untuk menekan angka kemiskinan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan suatu program Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera).

Berikut adalah penjelasan mengenai Tujuan dan Manfaat Bansos Rastra :

Tujuan

Mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah 10kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus.

Manfaat

Berikut beberapa manfaat dari Bansos Rastra :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM,
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi,
4. Stabilitas harga beras di pasaran,
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional,
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan adanya program Bansos Rastra ini, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam kebutuhan pangan (Beras).

Program Bansos Rastra adalah salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan yang berada di kluster 1, yaitu berupa program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung. Program ini merupakan wujud nyata dari Peraturan Presiden

Nomor 96 Tahun 2015 yang mengatur tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena dengan adanya program Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) ini membantu pemerintah dalam membantu dan memberikan kebutuhan pangan (beras) untuk masyarakat yang kurang mampu.

Adapun pendistribusian Bansos Rastra yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan beroperasi di 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, dan salah satunya yaitu di Kecamatan Keritang. Nama-nama desa di Kecamatan keritang kabupaten Indragiri Hilir yang menerima Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel I.2 : Nama-nama desa di Kecamatan Keritang yang mendapatkan Beras Bersubsidi (Bansos Rastra)

NO	NAMA-NAMA DESA DIKECAMATAN KERITANG	JUMLAH KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
01.	KOTABARU RETEH	196
02.	SEBERANG PEBENAAN	152
03.	PEBENAAN	167
04.	NUSANTARA JAYA	182
05.	KEMBANG MEKAR SARI	170
06.	KOTABARU SEBERIDA	245
07.	PASAR KEMBANG	187
08.	KUALA KERITANG	123
09.	KUALA LEMANG	79
10.	TELUK KELASA	103
11.	PENGALIHAN	141
12.	PANCUR	46
13.	SENCALANG	67
14.	KAYU RAJA	26
15.	LINTAS UTARA	36
16.	NYIUR PERMAI	48
17.	PETALONGAN	19
	JUMLAH	1987

Sumber : Kantor Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Berdasarkan tabel mengenai nama-nama desa di Kecamatan Keritang yang mendapatkan beras bersubsidi (Bantuan Sosial Beras Sejahtera), peneliti hanya mengambil beberapa desa yang menjadi sampel untuk penelitian. Adapun desa-desa yang di jadikan sampel yaitu desa-desa yang memiliki masalah atau terkendala dalam pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel I.3 : Nama-nama desa di Kecamatan Keritang yang memiliki Masalah dalam Penyaluran Beras Bersubsidi (Bansos Rastra)

NO	NAMA-NAMA DESA DIKECAMATAN KERITANG	JUMLAH KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
01.	KOTABARU SEBERIDA	245
02.	PASAR KEMBANG	187
03.	SEBERANG PEBENAAN	152
04.	PENGALIHAN	141
05.	KUALA KERITANG	123
06.	PANCUR	46
	JUMLAH	894

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan penjelasan diatas, nama-nama desa tersebut merupakan desa-desa yang memiliki suatu masalah dalam pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), baik dalam terhambatnya waktu penyaluran yang terjadi, maupun dalam data yang tidak sesuai atau pendistribusian tidak tepat sasaran, dan sistem yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan prasurevey setiap desa memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu data penerima bantuan beras merupakan data lama sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya dapat tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut karena tidak terdaftar menjadi penerima bantuan beras yang sah, dan ada

juga masyarakat yang memang namanya sudah terdaftar menjadi penerima yang sah akan tetapi masyarakat tersebut sudah dikatakan mampu ataupun sejahtera tetapi masih saja mengambil bantuan tersebut, “Ujar Kepala Desa”

Selanjutnya dalam waktu pendistribusian Bansos Rastra juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana desa tersebut terhambat dalam waktu penyaluran Bansos Rastra sehingga masyarakat lama mendapatkan bantuan tersebut, dan ada juga data tidak sesuai sehingga tidak tepat sasaran seperti dari hasil wawancara salah satu masyarakat di Desa Seberang Pebenaan, ada masyarakat yang tidak terdaftar atau seharusnya tidak mendapatkan beras tetapi masyarakat itu malah mendapatkan beras tersebut, dan ada juga informasi bahwa ada masyarakat saat ingin mengambil beras karena namanya sudah terdaftar tetapi beras tersebut sudah tidak ada lagi di tempat pendistribusian “Ujar Pak Rukim”.

Dan masalah penyaluran juga terjadi di Desa Kotabaru Seberida, dimana jumlah beras yang didapatkan masyarakat tidak sesuai dengan pedoman umum Bansos Rastra 2018, dimana masyarakat hanya mendapatkan 5/10Kg 3 bulan. Padahal kita ketahui jumlah beras yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu sebanyak 10Kg perbulan tanpa mengeluarkan biaya tebus, akan tetapi di Desa tersebut masih ada juga masyarakat yang membayar beras tersebut “Ujar Ibu Daya (KPM)”. Begitu juga di desa-desa yang ingin diteliti, karena masalah yang terjadi hampir sama dengan desa-desa lainnya.

Data mengenai nama-nama desa di Kecamatan Keritang dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan Bansos Rastra merupakan data yang sudah di tetapkan atau dibakukan dari pusat.

Adapun yang memberikan sosialisasi mengenai Bansos Rastra ke masyarakat, yaitu dari BULOG, Dinas Sosial, dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Sedangkan pengawasan pendistribusian dari Dinas Sosial.

Adapun kriteria masyarakat penerima manfaat Bansos Rastra sesuai Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018, antara lain:

1. Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk didalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
2. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.
3. DT-PPM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
4. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.
5. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri,
 - b. Nama Kepala Keluarga,
 - c. Nama anggota Keluarga Lainnya,
 - d. Alamat Tinggal Keluarga,
 - e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPM.

Adapun mekanisme pendistribusian Bansos Rastra dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera, bisa di lihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar I.1 : Gambar Mekanisme dalam Pendistribusian Bansos Rastra



Adapun Mekanisme penyaluran Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera), antara lain :

- a. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra sampai Titik Distribusi (TD), antara lain:
 1. Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai keTD.
 2. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
 3. Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD.
 4. Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial,Perum BULOG menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Penyaluran Bansos Rastra.
 5. Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO Bansos Rastra.
 6. Sesuai dengan SPPB/DO,Perum BULOG melalui Satker Bansos Rastra menyalurkn Bansos Rastra sampai ke TD,termasuk apabila terjadi pengantian dan/atau penyaluran kekurangan beras.
 7. Bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG sesuai ketentuan Kementerian Sosial.

8. Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.Direktorat enderal PM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c..Dinas Sosial Provinsi). ormat kesepakatan tertulis tersebut merujuk pada B Koordinasi yang terdapat pada Lampiran Pedum.
9. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD,dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim Koordiinasi Bansos Pangan dan/atau Pelaksana Distribusi diGudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita cara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pelaksana Distribusi serta Perum BULOG.Berita cara di maksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (cDinas Sosial).
10. Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
11. Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan di buat BST yang di tandatangani oleh kedua belah pihak. BST dibuat

rangkap (dua) untuk disimpan oleh masing-masing pihak. ormat BST terdapat pada Lampiran Pedum. BST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum BULOG kepada Kementerian Sosial untuk pencairan dana Bansos Rastra.

12. Dalam hal kuantitas dan/atau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BST, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra dan/atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG, turan jam diatas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang dikualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana Distribusi setelah BST di tandatangani.

13. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos Rastra tidak dapat di lakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial

(c... Direktorat enderal PM) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Bansos Rastra.

- b. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke Titik KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
1. Penyaluran Bansos Rastra dari TD keTB sampai keKPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
 2. Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra diTB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra sejumlah kg setiap bulan.
 3. KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distirbusi di TB tanpa di kenakan biaya apapun.
 4. TB ditetapkan ditempat/lokasi strategis yang mudah di jangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan.TB di lengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra.
 5. Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti KPM lansia,penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi ditingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.

6. Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM terdapat pada Lampiran Pedum.
7. Dokumen DPM untuk setiap penyaluran Bansos Rastra langsung dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.. Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan dokumen DPM versi elektronik (softcopy) kepada Kementerian Sosial. Hardcopy DPM disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
8. Dokumen DPM dan DPM diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program Bansos Rastra.
9. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.. Dinas Sosial). apabila memerlukan penggantian KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan KPM Usulan melalui SKSNG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.

Secara singkat mengenai mekanisme atau proses pendistribusian Bansos Rastra, antara lain:

- a. Keluar dulu namanya SPP dari pusat atau Kementerian Sosial yang menentukan jumlah berapa yang diterima KPM di kecamatan Keritang.
- b. Koordinasi dengan kecamatan apakah sudah siap untuk menerima.
- c. Ada namanya DO (Delivery Order). Dengan DO ini gudang mengeluarkan barang sesuai dengan jumlah DO yang ditetapkan.
- d. Berita acara serah-terima antara sipengawal atau pembawa atau pengawas beras dengan pihak kecamatan.
- e. Setelah itu dari pihak kecamatan memberikan beras kepada desa-desa yang berada di kecamatan tersebut.
- f. Selanjutnya dari pihak desa (kepala desa) meminta bantuan kepada RT untuk memberikan beras tersebut kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang sudah terdaftar sebagai penerima Bansos Rastra.

Dari hasil pengamatan sementara dan wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa fenomena yang terjadi di dalam pendistribusian Bansos Rastra. Adapun fenomena yang mendukung untuk di lakukan suatu penelitian, antara lain :

1. Berdasarkan prasurvey adanya pendistribusian Bansos Rastra yang tidak tepat waktu, seperti pendistribusiannya lewat dari 1 bulan. Seharusnya pendistribusian Bansos Rastra tersebut di lakukan setiap bulan yaitu 1 kali sesuai Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

2. Berdasarkan prasurvey adanya pendistribusian Bansos Rastra yang tidak tepat sasaran, karena data penerima bantuan beras merupakan data yang lama, sehingga masih ada masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, hal ini membuat pendistribusiannya kurang efektif.
3. Berdasarkan prasurvey adanya pendistribusian Bansos Rastra yang tidak tepat jumlah, dimana jumlah beras yang di terima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) seharusnya 10kg tetapi KPM mendapatkan 5/10Kg pertiga bulan, hal tersebut tidak sesuai Pdoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dengan judul : “Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam ilmu administrasi, khususnya dalam efektifitas mengenai pelaksanaan tugas Bulog dalam pendistribusian Bansos Rastra.
- b. Kegunaan akademis, penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Perum Bulog Sub Divisi Regional untuk dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Bulog dalam pendistribusian Bansos Rastra.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian di perlukan konsep landasan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian. Selanjutnya dapat di lihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan di uraikan beberapa teori yang di gunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan.

Menurut Sondang P. Siagian, Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman Syafri, 2012 ; 9).

Selanjutnya menurut Siagian (2011;2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Siagian (2014;3), mengemukakan administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan aktifitas-aktifitas tertentu yang dimulai dari

awal adanya dua orang yang berkomitmen untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut The Liang Gie, mendefinisikan administrasi merupakan rangkaian aktifitas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang didalam kerja sama mencapai tujuan bersama (dalam Pasolong 2013;3).

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih di dasarkan atas rasionalitas dalam melaksanakan serangkaian kegiatan/aktifitas yang dilakukan didalam suatu organisasi dalam usaha menetapkan sasaran dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu sama lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlunya tempat(wadah) untuk bekerjasama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Latin, *organum* yang berarti alat bagian, dan anggota badan.

Menurut John D. Mooney mengemukakan organisasi merupakan sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang di selenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuannya (dalam Syafiie 2014;114).

Selanjutnya menurut Thoha (2010;205) Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bersifat umum, artinya suatu tujuan yang semua orang di dalamnya sepakat baik terpaksa atau apapun sadar untuk mencapainya.

Selanjutnya menurut Siagian (2008;6), Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang di sebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2014;5) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Hayat (2017;9) Organisasi merupakan wadah yang mengorganisir seluruh komponen organisasi untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebagai wadah atau tempat dalam proses kerjasama dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugas atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Kegiatan yang dilakukan didalam suatu organisasi memerlukan pengendalian serta penyusunan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas, maka harus menggunakan metode-metode, cara-cara dan teknik-teknik mengaturnya untuk tercapainya tujuan organisasi dengan baik maka diperlukan manajemen.

Menurut Usman (2013;6), Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Stoner,et.al berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan,mengorganisasikan, memimpin,dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris 2014;17).

Selanjutnya menurut Mary Parker Folet, Manajemen sebagi seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain,atau sebagai pengaturan ataupengelolaan sumberdaya yang ada sehingga hasilnya maksimal (dalam Zaidan Nawawi 2013;10).

Selanjutnya menurut Shafritz dan Ruseel mendefinisikan manajemen yaitu berkenan dengan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi,dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Pasolong 2013;82).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan cara atau strategi seorang mengarahkan atau mempegaruhi orang lain tanpa orang tersebut tidak terbebani atau terpaksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dapat dikatakan, sumber daya manusia adalah setiap orang yang tergabung dalam

organisasi dan melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Organisasi harus didukung dengan sumber daya manusia yang cakap, karena sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan usaha atau kegiatan di dalam organisasi tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Ivancevich dkk (2008;27) yang menyebutkan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah pengelolaan sumber daya manusianya.

Menurut Nawawi (2008;41) yang menyebut bahwa ada tiga pengertian sumber daya manusia, sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai pergerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) di dalam organisasi yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

Sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian sangat perlu adanya manajemen sumber daya manusia, karena dengan memanfaatkan fungsi manajemen sumber daya manusia dapat memberikan dukungan kepada semua personil dalam organisasi guna mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Edwin B. Flippo, Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar, tercapainya berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat (dalam Sedarmayanti 2009;5).

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2011;10) MSDM merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2006;10) Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai/anggota, dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Sutrisno (2015;5) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bidang strategis dari organisasi, dan mengelola sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara untuk *me-manage* sumberdaya yang ada agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Konsep Manajemen Logistik

Menurut Bowersox (2002;11) Manajemen Logistik adalah unit karena ia adalah salah satu aktivitas perusahaan yang tertua dan termuda, dan dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para pemasok, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan konsumen.

Menurut Bowersox (2002;13) Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang rendah.

Untuk mencapai tujuan logistik maka diperlukan komponen-komponen dalam pendistribusian, antara lain :

- a. Struktur lokasi fasilitas, jaringan fasilitas suatu perusahaan adalah serangkaian lokasi dan melalui material atau produk. Adapun fasilitas tersebut meliputi gudang-gudang dan toko-toko.
- b. Komunikasi adalah suatu interaksi yang disampaikan dan menerima informasi dari pihak satu ke pihak yang lain.
- c. Transportasi adalah alat yang digunakan pemindah logistik dari mana menuju kemana.
- d. Penyimpanan, dimana penyimpanan logistik pada struktur fasilitas, meliputi pergerakan logistik, pengepakan, dan pengemasan.

6. Konsep Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Di sebut efektif apabila tercapai tujuan sasaran.

Menurut Handoko (2003;7),Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Stoner dan Carles Wankel, mengemukakan Efektifitas dapat di artikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (kuantitas,kualitas,waktu) (dalam Nawawi, 2003;40).

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2009;59) Efektifitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Selanjutnya menurut Siagian (2016;20) mengatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Berarti efektifitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal, yaitu :

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi,
2. Jumlah dan mutu barang dan jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan,
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu sudah ditetapkan,
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Menurut Richard M. Steers, pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep efektifitas dalam ruang lingkup organisasi setidaknya ada dua pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan ukuran efektifitas yang univariansi, yaitu efektifitas diukur melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir, jadi kerangka acuannya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah satu dimensi atau kriteria yang bersifat evaluatif.
2. Pendekatan efektifitas yang multivariansi, yaitu konsep efektifitas melalui sudut pandang terpenuhinya ukuran-ukuran yang berdimensi ganda dan memakai kriteria tersebut secara serempak (dalam Zaidan Nawawi, 2013;191).

Selanjutnya menurut Richard M. Steers (1985;46) mengemukakan Efektifitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.

Adapun indikator dari Efektifitas menurut Duncan yang di kutip Richard

M. Steers (1985;53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” Sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) Jumlah yang ditentukan.
- b. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, (2) proses sosialisasi.
- c. Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan, (2) sarana dan prasarana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa efektifitas adalah suatu kegiatan yang telah di laksanakan secara tepat sasaran dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Akan tetapi di butuhkan koordinasi agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

7. Konsep Koordinasi

Menurut Moekijat (dalam Zulkifli 2009;94) mengemukakan koordinasi sebagai sinkronisasi (penyelarasan) dari pada kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu, dan pengarahannya pelaksanaan yang tepat mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan yang selaras (harmonis) dan disatukan untuk suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Husaini Usaman (2013;488) Koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan

menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Henry Fayol (dalam Syafiie 2006;85) mengemukakan koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan melaraskan semua kegiatan dan usaha. Dari pengertian koordinasi di atas Syafiie (2006;86) menyimpulkan bahwa unsur-unsur koordinasi yaitu :

- a. Pengaturan
- b. Singkronisasi
- c. Kepentingan bersama
- d. Tujuan bersama

Selanjutnya menurut Usman (2013;487) mengemukakan tujuan dan manfaat koordinasi sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi, dan Simplifikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Untuk memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
- c. Agar mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan *Stakeholders* pendidikan yang saling bergantung, semakin besar dari unit-unit, makin besar kebutuhan akan pengoordinasian.
- d. Agar mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dinas pendidikan dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.
- e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
- f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis diantara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun non fisik dengan *stakeholders*.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan sumber daya pendidikan yang terbatas.
- h. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu.
- i. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

8. BULOG (Badan Urusan Logistik)

Perusahaan Umum (Perum) BULOG atau Badan Urusan Logistik adalah Badan Usaha Milik Negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras). Salah satu kegiatan penyaluran beras yang berdasarkan penugasan pemerintah kepada Perum BULOG yaitu penyaluran Bansos Rastra.

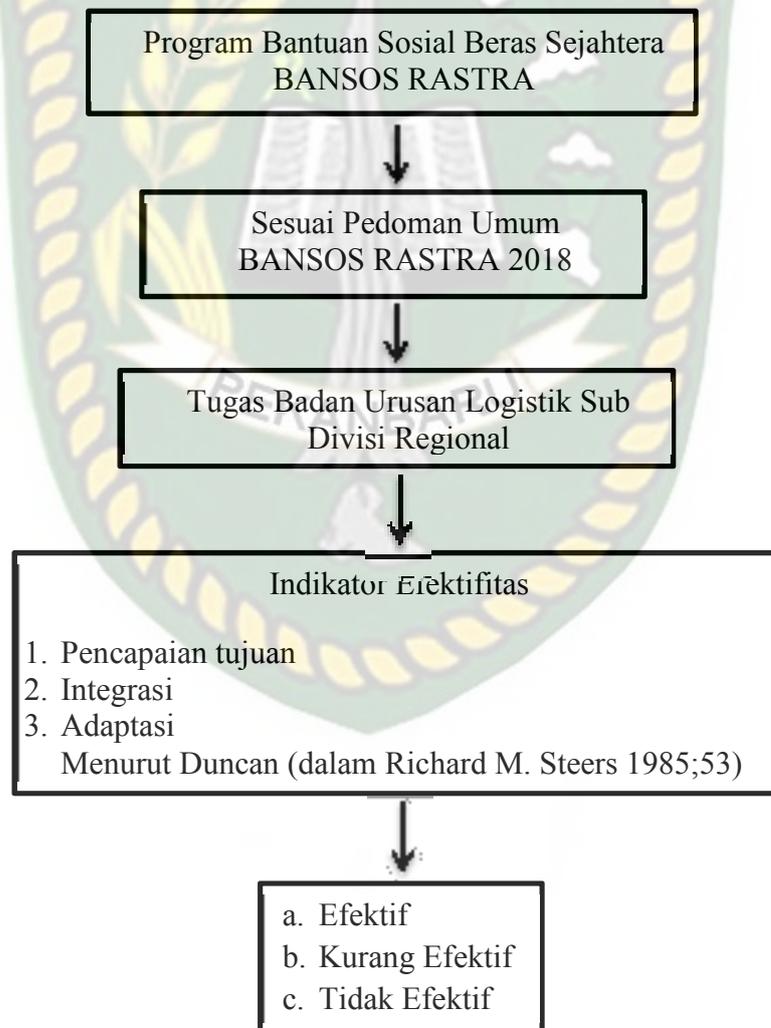
Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) merupakan program BULOG yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah/kuantum 10kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

Porgram Bansos Rastra juga merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung. Program ini juga sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras).

B. Kerangka Pikir

Di dalam suatu organisasi bisa mendapatkan hasil yang optimal, maka organisasi tersebut harus menjalankan pelaksanaannya dengan baik. Dimana pelaksanaan merupakan salah satu kunci utama tercapainya suatu target ataupun tujuan, agar mendapatkan hasil yang efektif.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalah pahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi yaitu dua orang manusia atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Manajemen adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
4. MSDM ialah ilmu dan seni yang mengatur hubungan, peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi.
5. Manajemen Logistik adalah unit karena ia didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para pemasok.
6. Efektifitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua tujuannya.
7. Koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan melaraskan semua kegiatan dan usaha.
8. BULOG atau Badan Urusan Logistik adalah perusahaan umum milik negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras).

9. Program Bansos Rastra (Batuan Sosial Beras Sejahtera) merupakan program yang membantu masyarakat yang kurang mampu dengan pemberian bantuan berupa beras kepada KPM dengan jumlah beras sebanyak 10kg /bulan tanpa dikenakan biaya tebus.
10. KPM Bansos Rastra adalah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan sosial Beras Sejahtera.
11. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu :(1) kurun waktu pencapaiannya di tentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkritt, (3)Jumlah yang ditentukan.
12. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi,pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor,yaitu : (1) prosedur, (2) proses sosialisasi.
13. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyatukan suatu individu terhadap perubahan -perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan , (2) sarana dan prasarana.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dimensi (item penilaian), dan skala pengukuran untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dimensi (item penilaian), dan skala pengukuran untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Efektifitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.	Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divre Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)	1. Pencapaian Tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi	a. Tepat waktu dalam pendistribusian Bansos Rastra b. Tepat sasaran dalam pendistribusian Bansos Rastra c. Jumlah beras yang di dapatkan sesuai pedoman umum bantuan beras sejahtera a. Prosedur mengenai Bansos Rastra b. Sosialisasi mengenai Bansos Rastra a. Peningkatan kemampuan mengenai program Bansos Rastra b. Sarana dan prasarana mengenai Bansos Rastra	a. Efektif b. Kurang Efektif c. Tidak Efektif a. Efektif b. Kurang Efektif c. Tidak Efektif a. Efektif b. Kurang Efektif c. Tidak Efektif
Menurut Richard M. Steers (1985;46).				

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

E. Teknik Pengukuran

Penelitian ini menggunakan Ranting Scale, karena lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya (Sugiyono 2016;113). Pengukuran terhadap indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternatif jawaban tersebut dan setiap jawaban diberi bobot skor yaitu :

- a. Efektif dengan bobot skor : 3
- b. Kurang Efektif dengan bobot skor : 2
- c. Tidak Efektif dengan bobot skor : 1

Rumus :

Skor Maksimal = Bobot skor tertinggi x jumlah item yang di nilai (indikator)
x jumlah responden (di sini adalah 48 orang).

Skor Minimal = Bobot skor terendah x jumlah item yang di nilai (indikator)
x jumlah responden (di sini adalah 48 orang).

Melalui skor jawaban tersebut, maka di peroleh skor maksimal yaitu $3 \times 7 \times 48 = 1.008$ sedangkan skor minimal yaitu $1 \times 7 \times 48 = 336$, sehingga interval skor untuk seluruh pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{\text{Skor maksimal} - \text{Skor minimal}}{\text{Banyaknya kategori penilaian}} \\
 &= \frac{1.008 - 336}{3} \\
 &= \frac{672}{3} \\
 Interval &= 224
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

- Efektif : Apabila seluruh indikator Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) berada pada skor 785 – 1.008
- Kurang Efektif : Apabila dua indikator Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) berada pada skor 561 – 784
- Tidak Efektif : Apabila satu indikator Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) berada pada skor 336 – 560

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 48 responden dengan skor tertinggi 432 dan skor terendahnya 144 dengan kelas interval 96 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 337 – 432.

Kurang Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 241 – 336.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 144 – 240.

2. Integrasi

Pengukurannya adalah dengan memberikan 2 pertanyaan untuk 48 responden dengan skor tertinggi 288 dan skor terendahnya 96 dengan kelas interval 64 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 225 – 288.

Kurang Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 161 – 224.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 96 – 160.

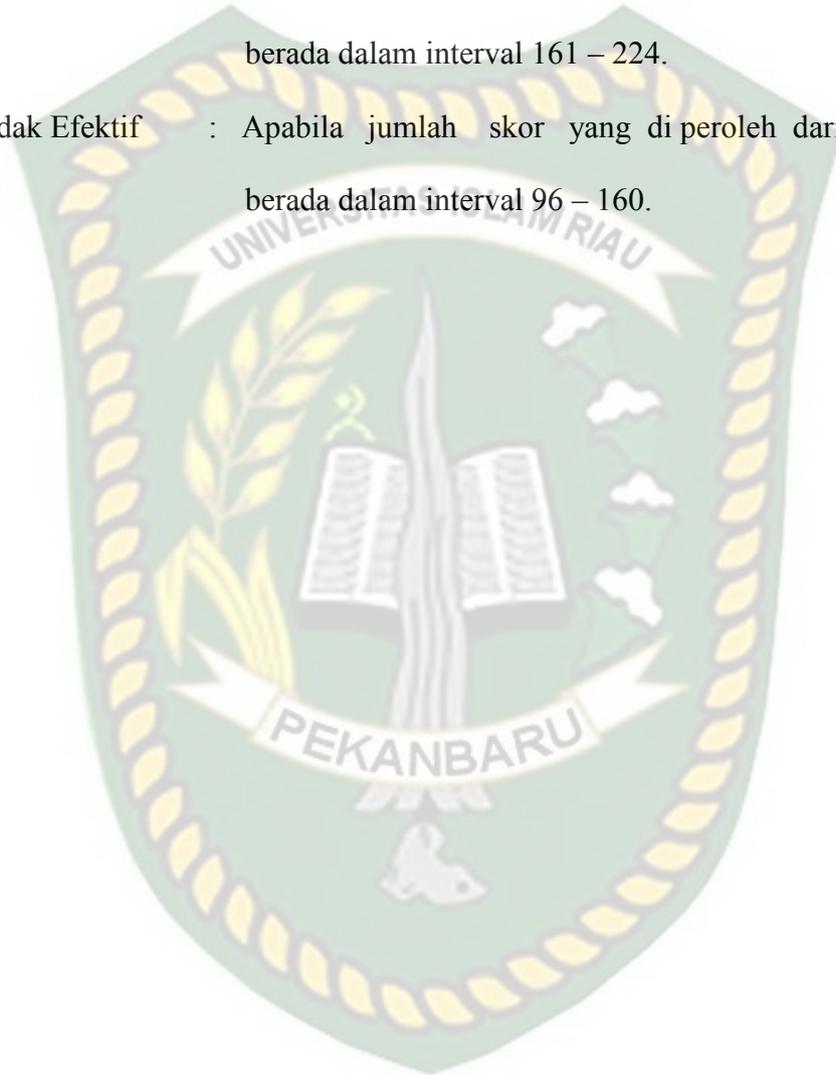
3. Adaptasi

Pengukurannya adalah dengan memberikan 2 pertanyaan untuk 48 responden dengan skor tertinggi 288 dan skor terendahnya 96 dengan kelas interval 64 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 225 – 288.

Kurang Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 161 – 224.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang di peroleh dari kuisoner berada dalam interval 96 – 160.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif yang artinya peneliti berusaha menggambarkan secara keseluruhan tentang bagaimanakah Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) dan dengan menggunakan metode kuantitatif karena peneliti bermaksud memberikan responden yang detail melalui data serta fakta dilapangan, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitaian ini peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu di Kecamatan Keritang dan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divisi Regional Tembilahan. Adapun peneliti ingin meneliti di lokasi tersebut karena Kecamatan Keritang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan pemilihan tempat penelitian ini karena pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) kurang efektif, karena adanya terhambatan-hambatan yang terjadi seperti waktu penyaluran dan jumlah yang tidak sesuai, serta tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016;90) mendefenisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas,karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari,dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Menurut Moh Nazir (2003;273)Sampel adalah bagian dari jumlah, karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Untuk lebih detailnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi %
1.	Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG)	1	1	100 %
2.	Pegawai BULOG bagian penyalur Bansos Rastra	9	6	67 %
3.	Pak Camat Keritang	1	1	100 %
4.	Kepala Desa di Kecamatan Keritang	17	6	35 %
5.	Pak RT, yang berada di 6 Desa di Kecamatan Keritang	199	6	3 %
6.	KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bansos Rastra, yang berada di 6 Desa di Kecamatan Keritang	894	30	3 %
	JUMLAH	1.121	50	—

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera), ialah menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dan Teknik Insidental Sampling.

Teknik Sampling Jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi dipakai sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, menurut Sugiyono (2014;85). Hal Adapun sub populasi yang menggunakan Teknik Sampling Jenuh ialah Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG), Pegawai BULOG bagian penyalur Bansos Rastra, dan Pak Camat Keritang.

Teknik Insidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, tetapi orang tersebut itu sesuai sebagai sumber data, menurut Sugiyono (2016;96) penggunaan sampel ini di karenakan responden jumlah tidak terhingga. Adapun sub populasi yang menggunakan Teknik Insidental Sampling ialah Kepala Desa di Kecamatan Keritang, Pak RT di Desa-desanya Kecamatan Keritang, dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bansos Rastra.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi data yang berkenaan dengan Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)
- b. Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini di peroleh secara tidak langsung dari beberapa sumber yang sudah diolah baik dalam bentuk buku yang berkaitan dengan Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang di lakukan melalui penyebaran pertanyaan tertulis kepada Pegawai (BULOG) bagian penyaluran Bansos Rastra, Kepala Desa di Kecamatan Keritang, Pak RT di Desa-desa Kecamatan Keritang dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bansos Rastra.

2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informen untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteili, adapun wawancara yang dilakukan tertuju kepada Pimpinan BULOG Subdivre Tembilahan, dan Pak Camat Keritang.
3. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna mengetahui bagaimana Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)
4. Dokumentasi adalah salah satu bukti yang akurat dalam melakukan penelitian, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data di kelompokkan dan di olah menurut jenisnya. Kemudian di analisis secara Deskriptif melalui pendekatan Kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, angka, skor, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimulai pada bulan November sampai April 2019 :

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian mengenai Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera).

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP				■																				
3	Revisi UP					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner												■	■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																■	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perum BULOG Sub Divisi Regional Tembilahan

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau di singkat dengan Perum Bulog merupakan sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967, sejak tahun 2003 status Bulog berubah menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Adapun VISI dan MISI Perum Bulog, antara lain;

VISI :

“Menjadi Perusahaan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan”

MISI :

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang professional, teknologi terdepan, dan sistim yang terintegrasi
3. Menerapkan prinsip kata kelola Perusahaan yang baik, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan pokok.

Tata Nilai Perusahaan Bulog, antara lain :

1. Integritas
Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Perilaku utama :
 - a. Bertakwa dan jujur
 - b. Taat azaz
 - c. Beretika dan berkomitmen
2. Professional
Bekerja cerdas berdsarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab.
Perilaku utama :
 - a. Kompeten
 - b. Bertanggung jawab
 - c. Cermat, teliti dan tuntas
3. Dinamis
Selalu bersemangat untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang baik.
Perilaku utama :
 - a. Gesit dan tangkas
 - b. Adatip
 - c. Kreatif dan inovatif
4. Peduli
Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan serta memberi solusi terbaik kepada pemangku kepentingan.
Perilaku utama :
 - a. Peka
 - b. Proaktif
5. Totalitas
Mendayagunkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, serta bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Perilaku utama:
 - a. Fokus
 - b. Bersungguh-sungguh
 - c. Bekerjasama

Tugas Pokok seksi Bulog Sub Divisi Regional Tembilahan, antara lain :

1. Kepala Seksi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok melakukan pengamatan dan pengumpulan data harga gabah, beras dan pangan pokok lain serta melakukan *market intelligence*; penyiapan data permintaan dan pasokan komoditas, perencanaan penyaluran; penyediaan data statistik, seleksi dan evaluasi mitra kerja pengadaan gabah/beras dan pangan pokok lain, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan gabah/beras PSO dan Komersial serta pangan pokok lain, L/C pengadaan, biaya eksploitasi; penyiapan administrasi pengadaan; pengelolaan pergudangan, administrasi dan operasional persediaan, perawatan, pengendalian mutu, dan angkuta; administrasi dan operasional penyaluran beras, dan CPP; serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik.
2. Kepala Seksi Komersial dan pengembangan bisnis mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan pengendalian, operasi penjualan distributor, penjualan langsung, pengiriman dan pengendalian produk dari pusat distribusi, serta pengendalian distribusi produk kepada pelanggan penjualan industri dan grosir, pelanggan penjualan langsung dan outlet binaan, pengembangan bisnis dan industri hulu (on farm dan pengolahan), pengembangan bisnis dan industri hilir (rumah pangan dan produk jual), administrasi biaya operasional dan hasil penjualan produk serta, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan komersial dan pengembangan bisnis.
3. Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan data SDM, administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan dan pengeluaran transaksi baik dalam keuangan operasional maupun komersial; pengelolaan surat menyurat, arsip dan perjalanan Dinas; pengelolaan kerumahtanggaan; pemeliharaan sarana dan prasarana (bangunan, kendaraan dan sarana lainnya; pengajuan usulan pengadaan sarana penyimpanan, sarana kantor, sarana lainnya, dan penggantian dan rehabilitas; Inventarisasi dan administrasi asset tetap, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi dan keuangan.
4. Kepala Seksi Akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan, pengecekan, pengoreksian, dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan dan buku tambahan terhadap akun/kontering uang muka, piutang, asset tetap. Hutang dan lainnya; pengecekan, perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan dan penyimpanan dokumen PPN, PPh, dan pajak lainnya; penyusunan laporan keuangan Subdivre; penerapan manajemen risiko dan kepatuhan di Subdivre, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan.

5. Kepala Gudang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengarahan dalam penyaluran, ketersediaan dan pengolahan bahan pangan digudang.
6. Juru timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluar barang komoditi Perum Bulog, serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bolug di gudang.
7. Petugas pemeriksa kualitas mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan biaya fumigasi, spraying serta biaya monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi tingkat serangan hama dan kondisi kualitas serta tindak lanjutnya, pemantauan pelaksana fumigasi dan spaying yang dilakukan oleh penyedia jasa perawatan kulit yang di tunjuk serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan Hama Gudang Terpadu (HGP).

B. Gambaran Umum Kecamatan Keritang

1. Sejarah Kecamatan Keritang

Kecamatan Keritang termasuk salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah-wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana pada awalnya nama Keritang berasal dari akar itang-itang, itang-itang ini adalah tumbuhan yang banyak terdapat disepanjang sungai Gangsal dan sungai Reteh. Akar pohon itang banyak tumbuh di tepi sungai sehingga menyulitkan masyarakat dahulu dalam perjalanan lalulintas air yang menggunakan perahu sampan (sampan dayung) dan pompong atau boat. Kemudian dari nama itang itu tersebut berubah menjadi “Keritang” yang sekarang sudah menjadi nama Kecamatan yaitu Kecamatan Keritang. Namun Keritang bukan hanya sebagai nama sebuah kampung akan tetapi nama sebuah kerajaan pada masa dahulu yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Keritang

Kecamatan Keritang adalah Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Reteh, dahulunya Kecamatan Keritang adalah wilayah perwakilan Kecamatan Reteh, tetapi pada tahun 1981 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1981 dengan menetapkan pembentukan Kecamatan Keritang yang terdiri dari 17 desa.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah Kecamatan Keritang, maka Kecamatan Keritang di mekarkan lagi sebanyak 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Kemuning.

Kecamatan Keritang merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya sangat strategis dan vital di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang berada ditengah-tengah atau penghubung antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga jalur darat dan air Kecamatan Keritang menjadi penting dan penopang bagi aktivitas sehari-hari Masyarakat dan aktivitas Pemerintahan.

Selanjutnya Kecamatan Keritang memiliki batas-batas wilayah dengan daerah lain, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kempas dan Kecamatan Enok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Reteh.

Tinggi Pusat Pemerintahan Kecamatan Keritang dari permukaan laut mencapai 6 s/d 35 M dengan keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut, sebagian rawa-rawa dan sebagian bukit yang terdapat di bagian selatan sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, maka daerah ini di golongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi yaitu 410 mm dan curah hujan terendah mencapai 87 mm. Kecamatan Keritang memiliki luas wilayah 697,47 Km². Dan populasi penduduknya 64.588 Jiwa. Adapun luas wilayah Kecamatan Keritang yang di rinci dapat di lihat dari tabel beriku:

Tabel IV.1 : Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Keritang tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
	Desa	
1.	Seberang Pebenaan	36,75
2.	Pebenaan	48,35
3.	Nusantara Jaya	45,80
4.	Kembang Mekar Sari	36,65
5.	Kotabaru Seberida	37,20
6.	Pasar Kembang	36,30
7.	Kuala Keritang	77,39
8.	Kuala Lemang	81,75
9.	Teluk Kelasa	49,00
10.	Pengalihan	77,15
11.	Pancur	63,00
12.	Sencalang	14,00
13.	Kayu Raja	*
14.	Lintas Utara	*
15.	Nyiur Permai	5,50
16.	Petalongan	10,53
	Kelurahan	
1.	Kotabaru Reteh	78,10
	JUMLAH	697,47

*Luas desa baru masih bergabung dengan desa induk

Sumber : Kantor Camat Keritang 2018

Dari tabel di atas terdapat 2 desa yang baru di mekarkan dan luas wilayahnya masih bergabung dengan desa induk, sehingga dapat di tarik data hanya 15 desa. Selain itu dari tabel juga menampilkan luas masing-masing desa. Desa yang paling kecil wilayahnya yaitu Desa Nyiur Permai, dengan memiliki luas wilayah 5,50 Km², sedangkan desa yang paling luas wilayahnya yaitu Desa Kuala Lemang, dengan memiliki luas wilayah 81,75 Km².

3. Penduduk

Penduduk asli daerah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah suku melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana suku-suku melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendang tersebut.

Bertumbuhan penduduk di Kecamatan Keritang cukup baik, terhitung pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Keritang mencapai 64.588 Jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Keritang tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah RT
		LK	PR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa				
1.	Seberang Pebenaan	1.761	1.839	3.600	29
2.	Pebenaan	2.750	2.621	5.371	39
3.	Nusantara Jaya	2.118	2.021	4.139	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kembang Mekar Sari	1.585	1.491	3.076	16
5.	Kotabaru Seberida	4.440	4.536	8.976	53
6.	Pasar Kembang	1.663	1.657	3.320	24
7.	Kuala Keritang	2.226	2.151	4.377	27
8.	Kuala Lemang	1.653	2.121	3.774	28
9.	Teluk Kelasa	1.483	1.320	2.803	20
10.	Pengalihan	3.551	3.659	7.210	54
11.	Pancur	1.397	1.610	3.007	23
12.	Sencalang	1.391	1.306	2.697	23
13.	Kayu Raja	814	941	1.755	23
14.	Lintas Utara	978	900	1.878	15
15.	Nyiur Permai	780	781	1.561	22
16.	Petalongan	2.007	1.815	3.822	20
	Kelurahan				
1.	Kotabaru Reteh	1.953	1.269	3.222	40
	JUMLAH	32.550	32.038	64.588	488

Sumber : Kantor Camat Keritang 2018

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah laki-laki yaitu 32.550 Jiwa sedangkan jumlah perempuan yaitu 32.038 Jiwa. Selanjutnya terdapat juga Desa Kotabaru Seberida yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu mencapai 8.976 Jiwa, hal ini sangat wajar karena Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat ibukota Kecamatan Keritang atau lebih di kenal dengan daerah pasar Kecamatan. Sehingga banyak masyarakat ingin bertempat tinggal di Desa Kotabaru dan membangun usaha-usaha seperti warung makan, toko-toko, dan sebagainya untuk meningkatkan taraf hidup. Sedangkan Penduduk paling sedikit yaitu Desa Nyiur Permai yaitu 1.561 Jiwa.

4. Agama

Sesuai dengan filsafah negara, kepercayaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa senantiasa di kembangkan dan di tingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial dan budaya.

Secara demografi, masyarakat Kecamatan Keritang adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religi islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kecamatan Keritang tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Semboyan *cultural malay identoc eith islam* masih sangat kentara di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini. Karena islam adalah agama mayoritas masyarakat Kecamatan Keritang. Maka Kecamatan Keritang hanya memiliki sarana ibadah bagi masyarakat islam, untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel berikut :

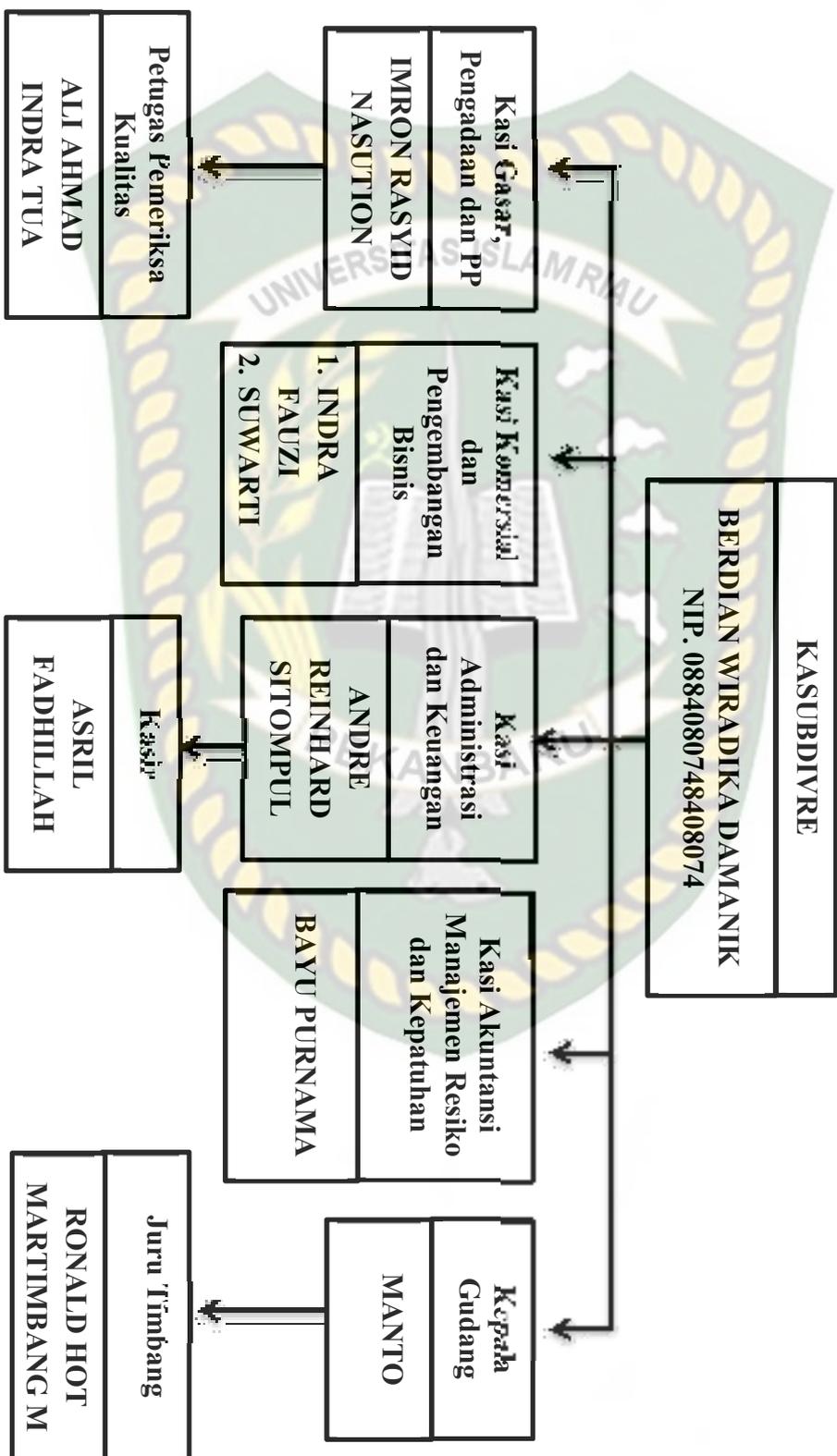
Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Keritang tahun 2017

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	67
2.	Surau	141
3.	Mushallah	4
4.	Gereja	-
5.	Pura	-
6.	Vihara	-
7.	Klenteng	-
	JUMLAH	212

Sumber : Kantor Camat Keritang 2018

Dari tabel di atas menyatakan bahwa Agama Islam sangat kuat di Kecamatan Keritang, terbukti dalam 16 desa dan 1 kelurahan. Sarana ibadah berjenis masjid ada sebanyak 67 bangunan, sarana ibadah berjenis surau ada 141 bangunan, dan sarana ibadah mushallah ada sebanyak 4 bangunan. Sedangkan untuk agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghochu sampai saat ini belum memiliki tempat ibadah.

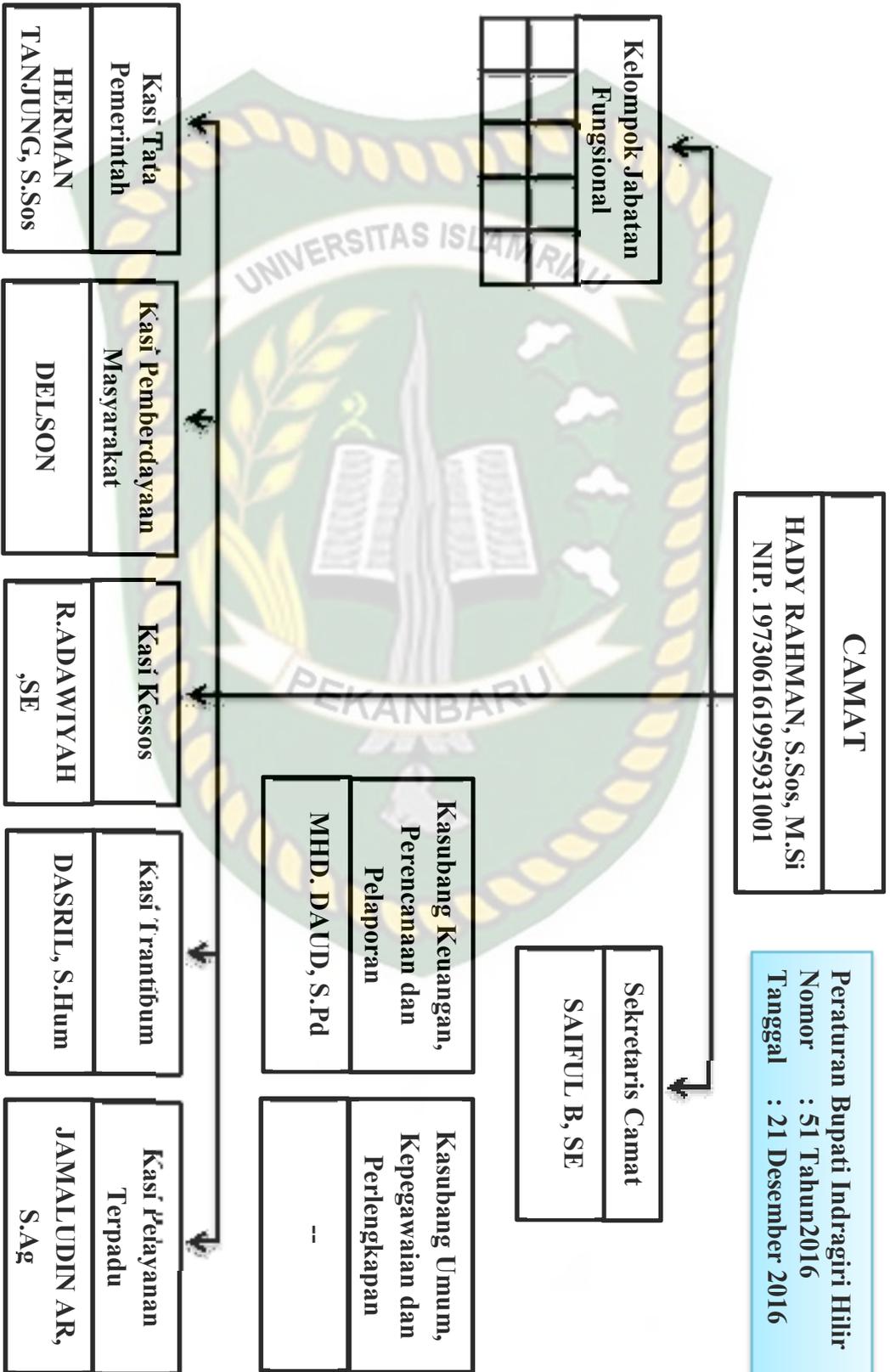
C. Badan Struktural Perum BULOG Sub Divisi Regional Tembilahan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Badan Organisasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 orang responden yang terdiri dari 1 Kepala BULOG Sub Divisi Regional Tembilahan, 6 Pegawai BULOG bagian Penyaluran Bansos Rastra, 1 Pak Camat Keritang, 6 Kepala Desa di Kecamatan Keitang, 6 Pak RT di Desa-desa Kecamatan Keritang, dan 30 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bansos Rastra di Kecamatan Keritang. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, maka dapat di lihat pada keterangan di bawah ini antara lain :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Devisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera), dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	29	58 %
2.	Perempuan	21	42 %
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin Laki-laki sebanyak 29 orang atau 58% responden, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang atau 42% responden.

2. Umur Responden

Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden berdasarkan umur responden. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan umur responden agar peneliti bisa mendapatkan gambaran dari umur responden. Untuk lebih jelas bisa di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden berdasarkan Umur Responden

NO	Umur	Jumlah	Presentase
1.	20-40	20	40%
2.	41-60	23	46%
3.	61-80	6	12%
4.	81 Tahun Keatas	1	2%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 50 responden, dapat disimpulkan : pada umur 20-40 Tahun berjumlah 20 orang atau 40%, pada umur 41-60 Tahun berjumlah 23 orang atau 46%, pada umur 61-80 Tahun berjumlah 6 orang atau 12%, dan pada 81 Tahun keatas berjumlah 1 orang atau 2%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Kemudian dalam identitas reponden yang berada pada peelitian ini terdapat juga identitas Tingkat Pendidikan, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilhat dari tabel berikut :

Tabel V.3 : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Sekolah	3	6%
2.	SD sederajat	22	44%
3.	SMP sederajat	10	20%
4.	SMA sederajat	7	14%
5.	Strata Satu (S.1)	7	14%
6.	Magister / S.2	1	2%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden, berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden yaitu Tidak Sekolah sebanyak 3 orang atau 6%, SD sederajat sebanyak 22 orang atau 44%, SMP sederajat sebanyak 10 orang atau 20%, SMA sederajat sebanyak 7 orang atau 14%, Strata Satu (S.1) sebanyak 7 orang atau 14%, dan Magister / S.2 sebanyak 1 orang atau 2%.

B. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan salah satu program berbasis keluarga dimana program ini dapat menanggulangi kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran ekonomi untuk masyarakat yang kurang mampu.

Program ini juga sangat berperan penting bagi pemerintah, karena dengan adanya program ini dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Agar dalam pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlunya kerjasama semua pihak yang menjalankan program Bansos Rastra agar mendapatkan hasil yang efektif.

Dalam rangka keberhasilan efektifitas suatu kebijakan, adapun yang menjadi tolak ukur dari acuan berlangsungnya efektifitas kebijakan, diantaranya :

1. Pencapaian Tujuan

Efektifitas pelaksanaan tugas Bulog dalam pendistribusian Bansos Rastra dapat di ukur salah satunya dengan indikator pencapaian tujuan. Tujuan menentukan suatu kebijakan, perencanaan kerja serta untuk memberi pemahaman kepada struktur organisasi agar tujuan tersebut diketahui oleh semua pihak didalam organisasi.

Kejelasan tujuan yang dicapai dapat memberikan gambaran tindakan apa yang akan dilakukan organisasi. Dalam hal ini pencapaian tujuan harus berjalan dengan baik, agar dapat menghasilkan efektifitas yang baik juga.

Indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item, yaitu : Tepat waktu dalam pendistribusian Bansos Rastra, Tepat sasaran dalam pendistribusian Bansos Rastra, dan Jumlah beras yang didapatkan sesuai pedoman umum Bansos Rastra. Untuk mengetahui tanggapan dari responden Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT terhadap indikator Pencapaian Tujuan. Dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Indikator Pencapaian Tujuan

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Tepat waktu dalam pendistribusian Bansos Rastra	8	9	1	18
2.	Tepat sasaran dalam pendistribusian Bansos Rastra	11	3	4	18
3.	Jumlah beras yang didapatkan sesuai Pedum Bansos Rastra	12	4	2	18
	JUMLAH	31	16	7	54
	Skor	93	32	7	132

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dari Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT yang menjawab efektif sebanyak 31 jawaban dengan skor 93, sedangkan yang menjawab kurang efektif sebanyak 16 jawaban dengan skor 32, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 7 jawaban dengan skor 7. Jadi hasil jawaban responden terhadap pencapaian tujuan masuk pada katagori “Efektif” dengan jumlah skor 132.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap indikator Pencapaian Tujuan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) teradap Indikator Pencapaian Tujuan

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Tepat waktu dalam pendistribusian Bansos Rastra	7	12	11	30
2.	Tepat sasaran dalam pendistribusian Bansos Rastra	18	4	8	30
3.	Jumlah beras yang didapatkan sesuai Pedum Bansos Rastra	8	8	14	30
	JUMLAH	33	24	33	90
	Skor	99	48	33	180

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanggapan responden dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menjawab efektif sebanyak 33 jawaban dengan skor 99, yang menjawab kurang efektif sebanyak 24 jawaban dengan skor 48, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak

33 jawaban dengan skor 33. Jadi hasil dari jawaban responden terhadap pencapaian tujuan masuk pada katagori “Kurang Efektif” dengan jumlah skor 180.

Dari kedua tabel diatas, dapat disimpulkan jawaban keseluruhan responden yang berjumlah 48 orang terhadap indikator pencapaian tujuan berada pada katagori “Kurang Efektif” dengan jumlah skor 312, sesuai dipenjelasan di bab 2.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Berdian Wiradika Damanik, SE selaku Pimpinan Bulog Subdivre Tembilahan mengenai indikator pencapaian tujuan, yang mana membahas mengenai waktu, sasaran dan jumlah pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau menjawab :

Mengenai waktu pendistribusian “Kalau mengenai ketepatan waktu memang tersangkut berbagai macam koordinasi: dalam hal pendistribusian Bansos Sartra tidak serta Pemkab Inhil harus menyalurkan, Bulog tidak bisa langsung menyalurkan, karena harus adanya koordinasi dengan Pemkab terkait dengan administrasi. Jadi seringkali memang penyaluran Bansos Sastra, misalnya alokasi Januari dan Februari terkadang disalurkan dibulan berikutnya. Tapi itu semua tidak dianggap telat karena biasanya dalam penyaluran Bansos Sastra biasanya 1 tahun itu sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang menyebabkan tidak tepat waktu, bukan karena dari Bulog belum siap atau tidak punya stok tetapi karena ada langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melengkapi semua dokumen atau kesiapan kecamatan atau kesehatan Pemkab. Adapun langkah-langkahnya yaitu dibentuk dulu dari kecamatan dan siapa yang bertanggung jawab”.

Sedangkan mengenai sasaran Pendistribusian “Perum Bulog sebagai operator, dalam urusan data itu dari BPS (Badan Pusat Statistik), bukan Bulog yang mempunyai data tetapi Bulog hanya menyalurkan”.

Selanjutnya mengenai jumlah pendistribusian “Ketentuan yang berlaku dipusat sebanyak 10 kg per KPM atau KK. Bulog menyalurkan sesuai dengan ketentuan tersebut”. (Wawancara : Hari Jum’at, 8 Maret 2019, jam 09:16 WIB).

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Hady Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pak Camat Keritang mengenai indikator pencapaian

tujuan, yang mana juga membahas mengenai waktu, sasaran dan jumlah pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau menjawab :

Mengenai waktu pendistribusian *“Sudah dipenuhi selama 12 bulan sebagaimana Juknis (Petunjuk Teknis) yang disampaikan oleh Timkor (Tim Koordinasi) Kabupaten pendistribusian itukan dari Bulog ke titik distribusi itu tanggung jawab Bulog, dan tanggung jawab Kecamatan dari distribusi ke titik bagi artinya dari Kecamatan ke Desa sudah dilakukan sesuai aturan. Buktinya sudah dipenuhi seluruh target 100% sudah dipenuhi dan tidak ada kendala saat ini. Terhambatnya waktu penyaluran dan belum terlaksana 1xsebulan karena biaya transportasi dari kabupaten, tetapi sesuai dengan pencairan tidak bisa setiap bulan tetapi hingga akhir tahun dapat dicapai”*.

Selanjutnya berdasarkan sasaran pendistribusian *“Belum karena data yang diambil yaitu sesuai sensus 2015. Akhirnya pada saat dipakai data itu untuk pendistribusian 2017/2018 masih ada orang-orang yang tahun 2015 dulu tingkat perekonomiannya masih rendah, tetapi sekarang mereka sudah diatas rata-rata atau sudah sejahtera. Akhirnya data tidak valid. Namun di awal tahun 2019 ini, Dinas Sosial sedang melakukan pencacahan ulang, validasi atau verifikasi data karena kedepan Rastra dirubah menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan kartu sejumlah Rp. 110.000”*.

Selanjutnya berdasarkan jumlah pendistribusian *“Ya. Alhamdulillah jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan yang disepakati sudah membaik”*. (Wawancara : Hari Senin, 18 Maret 2019, jam 11:20 WIB).

Sedangkan dari hasil observasi peneliti, peneliti menilai pencapaian tujuan dalam pendistribusian Bansos Rastra masih kurang efektif, dilihat dari keterlambatan waktu pendistribusian, sasaran yang masih kurang tepat karena masih ada masyarakat yang mampu/kaya malah mendapatkan bantuan tersebut, dan terakhir dari jumlah beras yang didapatkan KPM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan lebih jelasnya lagi bisa di lihat dari hasil jawaban ataupun tanggapan responden mengenai pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi yang peneliti buat di atas, dapat di tarik kesimpulannya bahwa Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan

Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) dengan indikator pencapaian tujuan terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam katagori “Kurang Efektif”.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi, dimana organisasi ingin melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 2 item, yaitu : Prosedur mengenai Bansos Rastra dan Sosialisasi mengenai Bansos Rastra. Untuk mengetahui tanggapan dari responden Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT terhadap indikator Integrasi. Dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT teradap Indikator Integrasi

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Prosedur mengenai Bansos Rastra	14	2	2	18
2.	Sosialisasi mengenai Bansos Rastra	12	4	2	18
	JUMLAH	26	6	4	36
	Skor	78	12	4	94

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dari Pegawai Bulog, Kades, dan Pak yang menjawab efektif sebanyak 26 jawaban dengan skor 78, sedangkan yang menjawab kurang efektif sebanyak 6 jawaban dengan skor 12, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 4 jawaban dengan

skor 4. Jadi hasil jawaban responden terhadap integritas masuk pada katagori “Efektif” dengan jumlah skor 94.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap indikator Integritas. Bisa Lebih jelasnya di lihat dari tabel berikut :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap Integritas

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Prosedur mengenai Bansos Rastra	14	8	8	30
2.	Sosialisasi mengenai Bansos Rastra	5	10	15	30
	JUMLAH	19	18	23	60
	Skor	57	36	23	116

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menjawab efektif sebanyak 19 jawaban dengan skor 57, kurang efektif sebanyak 18 jawaban dengan skor 36, yang menjawab tidak efektif sebanyak 23 jawaban dengan skor 23. Jadi hasil dari jawaban responden terhadap integrasi masuk pada katagori “Kurang Efektif” dengan jumlah skor 116.

Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan jawaban keseluruhan responden yang berjumlah 48 orang terhadap indikator integrasi berada pada katagori “Kurang Efektif” dengan jumlah skor 210, sesuai dipenjelasan di bab 2.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Berdian Wiradika Damanik, SE selaku Pimpinan Bulog Subdivre Tembilahan mengenai indikator integrasi, yang mana membahas mengenai prosedur dan sosialisasi pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau menjawab :

Mengenai prosedur atau proses pendistribusian, *“Adapun proses pendistribusian Bansos Sastra, antara lain:*

- a. Keluar dulu namanya SPP dari pusat atau Kementerian Sosial yang menentukan jumlah berapa yang diterima KPM di kecamatan Keritang*
- b. Koordinasi dengan kecamatan apakah sudah siap untuk menerima*
- c. Ada namanya DO (Delivery Order). Dengan DO ini gudang mengeluarkan barang sesuai dengan jumlah DO yang ditetapkan*
- d. Berita acara serah-terima antara sipengawal atau pembawa atau pengawas beras dengan pihak kecamatan”.*

Sedangkan mengenai sosialisasi pendistribusian *“Belum pernah sosialisasi kepada masyarakat kecamatan Keritang, tetapi hanya melihat penyalurannya”.* (Wawancara : Hari Jum’at, 8 Maret 2019, jam 09:21 WIB).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hady Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pak Camat Keritang mengenai indikator integrasi, yang mana juga membahas mengenai prosedur dan sosialisasi pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau menjawab :

Mengenai prosedur/proses pendistribusian *“Diantaranya, adalah :*

- a. Pengambilan sesuai DO (Delivery Older) yang diberikan*
- b. Dari DO (Delivery Older) diberikan per 3 bulan*
- c. Lebih cepat pendistribusian Bansos Rastra karena beras yang disalurkan kualitas bagus dari pada tahun sebelum-sebelumnya”.*

Selanjutnya mengenai sosialisasi pendistribusian *“Sering, karena memberikan sosialisasi mengenai pemahaman ke masyarakat karena ini harus di lakukan. Dan merupakan kewajiban yang harus disampaikan ke masyarakat Timkor yang menyampaikan sosialisasi disela-sela acara lain.* (Wawancara : Hari Senin, 18 Maret 2019, jam 11:24 WIB).

Berdasarkan hasil observasi penelitian ini, peneliti melihat dalam pendistribusian Bansos Rastra petugas atau orang yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab dalam pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera masih kurang dalam memberikn sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai pendistribusian Bansos Rastra tersebut. Sehingga peneliti menilai hasilnya kurang efektif.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara dan observasi yang telah di buat peneliti di atas, dapat di simpulkan bahwa Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) dengan indikator integrasi yang terdiri dari 2 item penilaian masuk dalam katagori “Kurang Efektif”.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan dimana suatu organisasi mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Salah satunya setiap program yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memberi pelayanan atau membantu masyarakat/warga negaranya. Salah satu program yang dibuat yaitu program Bansos Rastra (Bantuan sosial beras sejahtera) dimana bantuan ini untuk mengatasi kemiskinan saat ini. Indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 2 item, yaitu : Peningkatan kemampuan mengenai program Bansos Rastra, dan Sarana dan prasarana mengenai Bansos Rastra. Untuk mengetahui tanggapan dari responden Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT terhadap indikator Integrasi. Dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT teradap Indikator Adaptasi

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Peningkatan kemampuan mengenai Bansos Rastra	11	5	2	18
2.	Sarana dan Prasarana dalam Bansos Rastra	18	-	-	18
	JUMLAH	29	5	2	36
	Skor	87	10	2	99

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan/jawaban responden dari Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT yang menjawab efektif sebanyak 29 jawaban dengan skor 87, sedangkan yang menjawab kurang efektif sebanyak 5 jawaban dengan skor 10, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak jawaban 2 dengan skor 2. Jadi hasil jawaban responden terhadap adaptasi masuk pada katagori “Efektif” dengan jumlah skor 99.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap indikator Adaptasi. Bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat) teradap Indikator Adaptasi

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Efektif (Skor 3)	Kurang Efektif (Skor 2)	Tidak Efektif (Skor 1)	
1.	Peningkatan kemampuan mengenai Bansos Rastra	16	10	4	30
2.	Sarana dan Prasarana dalam Bansos Rastra	30	-	-	30
	JUMLAH	46	10	4	60
	Skor	138	20	4	162

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan dari penjelasan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menjawab efektif sebanyak 46 jawaban dengan skor 138, yang menjawab kurang efektif sebanyak 10 jawaban dengan skor 20, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 4 jawaban dengan skor 4. Maka hasil jawaban responden terhadap indikator adaptasi masuk pada katagori “Efektif” dengan jumlah skor 162.

Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan jawaban keseluruhan responden yang berjumlah 48 orang terhadap indikator adaptasi berada pada katagori “Efektif” dengan jumlah skor 261, sesuai dipenjelasan di bab 2.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Berdian Wiradika Damanik, SE selaku Pimpinan Bulog Subdivre Tembilahan mengenai indikator adaptasi, yang mana membahas mengenai peningkatan kemampuan, dan sarana dan prasarana pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau Menjawab :

Mengenai peningkatan kemampuan pendistribusian, “*Antara lain:*

- a. *Sistem sudah berjalan baik*
- b. *Sudah kurang keluhan dari masyarakat*
- c. *Dengan adanya DO beirita acara serah-terima sudah secara hukum membuat pihak Bulog nyaman bekerja*
- d. *Sudah efesien dan efektif.”*

Sedangkan sarana dan prasana pendistribusian, “*Baik, karena yang disediakan Bulog sudah sesuai standar yang digunakan saat ini, baik dari transportasi yang digunakan maupun pendukung sarana (Tempat Titik Pendistribusian).* (Wawancara : Hari Jum’at, 11 Maret 2019, jam 09:25 WIB).

Sedangkan hasil wawancara kepada Bapak Hady Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pak Camat Keritang mengenai indikator adaptasi, yang mana membahas mengenai peningkatan kemampuan, dan sarana dan prasarana pendistribusian Bansos Rastra.

Beliau menjawab :

Mengenai peningkatan kemampuan pendistribusian, “Antara lain :

- a. *Validasi dan verifikasi data dari Dinas Sosial*
- b. *Kecamatan tetap bekerjasama dengan Bulog, karena kadang kala yang kita temukan stok bulog inikan, kalau kita tidak selektif, ia bisa memberikan stok lama. Akhirnya kualitas beras menurun*
- c. *Adanya komunikasi dengan Timkor Kabupaten*

Selanjutnya sarana dan prasana pendistribusian, “Sudah baik, karena petugas sudah menyediakan sarana maupun prasana sesuai standar yang digunakan saat ini. (Wawancara : Hasri Senin, 18 Maret 2019, jam 11:31 WIB).

Berdasarkan observasi yang peneliti dapatkan, adaptasi pendistribusian Bansos Rastra kurang efektif, karena ada beberapa masyarakat yang masih merasa kurang dalam bantuan ini, dikarenakan jumlah 1 keluarga itu banyak makanya beras yang didapatkan tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi yang telah dijelaskan, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) dengan indikator adaptasi, terdiri dari 2 item penilaian masuk dalam katagori “Efektif”.

Dari pembahasan indikator di atas, selanjutnya untuk mengetahui keseluruhan tanggapan dari Pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT dalam pendistribusian Bansos Rastra, maka dapat dilakukan rekapitulasi responden dan jawaban responden dalam Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Subdivre Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera), agar lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Bulog, Kades, Pak RT terhadap Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1.	Pencapaian Tujuan	93	32	7	132
2.	Integrasi	78	12	4	94
3.	Adaptasi	87	10	2	99
	JUMLAH	258	54	13	325
	RATA-RATA	86	18	4	108

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari responden pegawai Bulog, Kades, dan Pak RT, dapat diketahui bahwa rata-rata skor tanggapan responden dengan kategori Efektif adalah 86 (258 skor), Kurang Efektif adalah 18 (54 skor), dan Tidak Efektif adalah 4 (13 skor). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan jumlah hasil dari rekapitulasinya adalah “Efektif” dengan rata-rata 108 (325 skor).

Selanjutnya untuk mengetahui keseluruhan tanggapan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam pendistribusian Bansos Rastra, dapat dilakukan dengan rekapitulasitas responden dan jawaban responden dalam Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat terhadap Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

NO	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1.	Pencapaian Tujuan	99	48	33	180
2.	Integrasi	57	36	23	116
3.	Adaptasi	46	10	4	60
	JUMLAH	202	94	60	356
	RATA-RATA	67	31	20	118

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas di jelaskan bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari responden KPM (Keluarga Penerima Manfaat), bisa diketahui bahwa rata-rata skor tanggapan responden dengan kategori Efektif adalah 67 (202 skor), Kurang Efektif adalah 31 (94 skor), dan Kurang Efektif adalah 20 (60 skor). Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan jumlah hasil dari rekapitulasinya adalah “Kurang Efektif” dengan rata-rata 118 (356 skor).

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir(Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera) masuk dalam katagori kurang efektif, sesuai dipenjelasan bab 2 dengan jumlah keseluruhan 681 berada pada interval kurang efektif. Artinya belum semua indikator terlaksana dengan Efektif.

Sedangkan dari hasil observasi penelitian, peneliti menilai terhadap ketiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam pendistribusian Bansos Rastra masih belum maksimal dikarenakan masih ada masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendistribusian Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) sehingga menghasilkan hasil yang Kurang Efektif.

C. Faktor-faktor penghambat Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan DiKecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir(Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Dalam pelaksanaan Pendistribusian Bansos Rastra untuk masyarakat yang kurang mampu diKecamatan Keritang, adapun faktor penghambatnya, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang benar. Dengan adanya sosialisasi akan mempermudah masyarakat dan pemerintah untuk saling berpendapat, bertukar pikiran, dan mendapatkan masukan maupun kritikan.

Saat berlangsungnya program Bansos Rastra di Kecamatan Keritang, sosialisasi ini hanya diwakilkan sama RT yang berada di desa-desa, hal tersebut agar lebih efektif. Akan tetapi tidak semua RT yang menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini, sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

2. Kurangnya Pengawasan

Setiap pelaksanaan kegiatan sangat pentingnya suatu pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan yang baik akan dapat melancarkan dan mempermudah dalam menjalankan suatu kegiatan yang berlangsung. Pengawasan ini adalah aktivitas pemantauan kegiatan penyaluran Bansos Rastra. Dimana pengawasan yang berlangsung di Kecamatan Keritang mengenai Bansos Rastra, agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan dapat dievaluasi agar program bantuan ini berjalan dengan efektif.

3. Data Bansos Rastra yang tidak Valid

Data merupakan suatu informasi ataupun bahan yang dianggap nyata atau fakta, dalam hal ini data sangat penting, karena dengan adanya data kita bisa mengetahui informasi. Tetapi data yang ada di Kecamatan Keritang tidak bisa dijadikan acuan, hal tersebut dikarenakan penerimaan bantuan beras ini masih menggunakan data lama, sehingga masyarakat yang seharusnya dapat tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut di rasakan hampir setiap desa-desa di Kecamatan Keritang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Tembilahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera). Peneliti menarik kesimpulan :

1. Pada indikator Pencapaian Tujuan peneliti menilai dalam pelaksanaan pendistribusian Bansos Rastra kurang efektif, karena banyak kendala berupa waktu, jumlah yang terjadi dalam pendistribusian Bansos Rastra, terutama yaitu data yang digunakan masih data yang lama, sehingga pendistribusian kurang efektif.
2. Pada indikator Integrasi peneliti menilai dalam proses pelaksanaannya sudah baik, akan tetapi kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas pendistribusian Bansos Rastra, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tersebut kurang efektif, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Bansos Rastra.
3. Pada indikator Adaptasi peneliti menilai dalam pendistribusian Bansos Rastra, pemerintah menyesuaikan diri dengan memberikan pelayanan publik lebih efektif berupa program-program, salah satunya dengan adanya program Bansos Rastra bisa mengurangi kemiskinan saat ini dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Di harapkan kepada petugas untuk benar-benar mengawasi pendistribusian Bansos Rastra agar tidak ada penyimpangan ataupun penyalahgunaan yang terjadi saat pendistribusian berlaku. Dan kepada petugas Pendistribusian Bansos Rastra harus melakukan evaluasi, karena dengan adanya evaluasi maka kesalahan yang pernah dilakukan tidak akan terulang kembali.
2. Diharapkan kepada petugas untuk benar-benar mendata masyarakat atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bansos Rastra agar tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan dan masyarakat yang tidak pantas untuk menerima bantuan. Agar masyarakat atau KPM bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi terutama dalam data penerima Bansos Rastra.
3. Di harapkan kepda petugas untuk melakukan sosialisasi lebih dari 1x mengenai Bansos Rastra, agar masyarakat juga mengetahui kapan pendistribusian Bansos Rastra dan tidak ada kesalah pahaman jika terjadi kendala saat pendistribusian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bowersox, Donald J, (Alih Bahasa : A. Hasymi Ali), 1978. *Manajemen Logistik*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Handoko, Hani T, 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- , 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Ivancevich, John M, dkk, 2008. *Prilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta, Erlangga.
- Mangkunegara, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh, Nazir, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari, 2003. *Kepemimpinan Mengefektifan Organisasi*. Jakarta, Gajah Mada Press.
- , 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasalong, Herbani, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Richard, M. Steers, 1985. *Efektivitas Organisasi*. Bandung, Erlangga.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Mandar Maju.

- Siagian, Sondang P, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Binapura Aksara.
- , 2011. *Filsafah Administrasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- , 2014. *Filsafah Administrasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- , 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- , 2016. *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sutrisno, Edy, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Kencana.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, PT. Erlangga.
- Thoha, Miftah, 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Rajawali Pres.
- Usman, Husaini, 2013. *Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Wanggai, Velix V. 2012. *Pembangunan Untuk Semua : Mengelola Pembangunan Regional ala SBY*. Jakarta, Bina Ghara.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres.
- Zulkifli, Awang, Azam, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kerta Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Zulkifli dan Yogia, Moris A, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Sumber website :

<https://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra>. di akses pada hari rabu, 7 November 2018, jam 16:05 WIB

<http://setkab.go.id/pengantar-presiden-joko-widodo-dalam-rapat-terbahas-mengenai-program-penanggulangan-kemiskinan-dan-persoalan-ketimpangan-ekonomi-rabu-16-maret-2016-pukul-16-00-wib-di-kantor-presiden/> di akses pada hari rabu, 7 November 2018, jam 16:13 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3736608/mensos-akan-konversi-subsidi-beras-sejahtera-ke-bansos> di akses pada hari rabu, 7 November 2018, jam 08:35 WIB

<http://www.bulog.co.id/sejarah.php> di akses pada hari sabtu, 16 Maret 2019, jam 09:16 WIB

Dokumen :

Undang-undang Dasar 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 Tentang BADAN URUSAN LOGISTIK.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.